



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAPTA KUNTA PURNAMA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 643240

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.256.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m²/89 m² di KOTA SURAKARTA ,
WARISAN Rp. 556.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m²/100 m² di SUKOHARJO,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 283 m²/200 m² di KARANGANYAR,
WARISAN Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m²/152 m² di KARANGANYAR,
WARISAN Rp. 566.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m²/48 m² di KARANGANYAR,
WARISAN Rp. 184.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 449.000.000

1. MOBIL, ISUZU WAGON Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000
3. MOTOR, HONDA G2EO2R21LO M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
5. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
240.000.000
6. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2021, HADIAH Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.015.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.735.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.735.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.